

ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN PESISIR DI DESA TOROKEKU KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN**Sutrisno ¹⁾, Andi Irwan ²⁾, ³⁾ Muh. Ramli.**¹⁾ Mahasiswa Perencanaan Wilayah Pascasarjana UHO, 2014²⁾ Dosen Fakultas Perikanan Dan Pascasarjana UHO³⁾ Dosen Fakultas Perikanan dan Pascasarjana UHO**ABSTRACT**

This study aims to analyze: (1) the level of slums in coastal settlements in South Konawe Regency, (2) efforts to improve the quality of coastal settlements in this Regency. This research was conducted in Torokeku Village, Tinanggea Sub-District, South Konawe Regency. This study uses a quantitative description method, and the data was obtained through observation, interviews, and literature studies. The analysis was carried out by using a location assessment formula based on Minister of Public Works and Housing Regulation No. 02 of 2016 by considering eight criteria: (1) Condition of residential buildings, (2) Environmental road conditions, (3) Clean water supply conditions, (4) Conditions for wastewater treatment, (5) Condition of waste treatment, (6) Fire protection conditions, (7) Coastal environmental conditions and (8) Coastal disaster risk conditions.

Based on the results of the analysis, the slum level of coastal settlements in Torokeku Village falls into the category of moderate slums. This is caused by the condition of high building density and the number of uninhabitable houses, damaged road conditions and not yet reaching all the houses, unsufficient clean water for the community, the absence of waste water treatment facilities, the absence of waste processing, the absence of fire protection facilities and the reduction of the mangrov ecosystem. Improving the quality of settlements is carried out through rehabilitation and home development in new locations; repairment and improvement of public facilities and infrastructure such as environmental roads, clean water, waste water treatment, waste treatment, and fire protection facility; and through the restoration the damage mangrov ecosystem.

Key words: *Level of Slumness, Quality Improvement, Coastal Settlement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Tingkat Kekumuhan Permukiman Pesisir di Kabupaten Konawe Selatan, (2) Upaya peningkatan kualitas permukiman pesisir di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif dimana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis dilakukan dengan menggunakan formula penilaian lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan delapan kriteria yaitu: (1) Kondisi bangunan hunian, (2) Kondisi jalan lingkungan, (3) Kondisi peneyediaan air minum, (4) Kondisi pengolahan air limbah, (5) Kondisi pengolahan sampah, (6) Kondisi proteksi kebakaran, (7) Kondisi lingkungan pesisir dan (8) Kondisi resiko bencana pesisir.

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kekumuhan permukiman pesisir di Desa Torokeku masuk dalam kategori kumuh sedang. Hal ini disebabkan oleh kondisi kepadatan bangunan yang cukup tinggi dan banyaknya rumah yang tidak layak huni, kondisi jalan lingkungan yang rusak dan belum menjangkau keseluruhan rumah, kondisi air bersih yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat, tidak adanya sarana pengolahan air limbah, tidak adanya sarana pengolahan sampah, tidak adanya sarana proteksi kebakaran serta berkurangnya ekosistem mangrov. Peningkatan kualitas Permukiman dilakukan melalui rehabilitasi dan pembangunan perumahan di lokasi baru; perbaikan dan peningktnan sarana dan prasarana umum seperti jalan

lingkungan, air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan sarana proteksi kebakaran; serta melalui pemulihan kerusakan ekosistem mangrov.

Kata kunci: Tingkat Kekumuhan, Peningkatan Kualitas, Permukiman Pesisir

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya tampung lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil sehingga penyediaan sarana prasarana terbatas ataupun pengetahuan dan kebiasaan masyarakat yang kurang menyebabkan penurunan tingkat kualitas lingkungan menyebabkan perubahan kondisi suatu kawasan menjadi permukiman kumuh. (Hastuti, 2017).

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya fasilitas fisik (ruang terbuka hijau/RTH, drainase, *supply* air bersih, jaringan komunikasi, dan lain-lainnya), fasilitas sosial (organisasi, sosial, kesehatan dan sebagainya). (Acharya, 2010). Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 648/440 tahun 2014 Desa Torokeku merupakan salah satu kawasan permukiman yang teridentifikasi sebagai permukiman kumuh. Dari hasil pengamatan penulis secara fisik Desa Torokeku memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, banyaknya bangunan rumah yang rusak dan tidak layak huni, sarana jalan lingkungan yang belum menghubungkan seluruh rumah, tidak memiliki pengelolaan limbah, tidak memiliki sarana pembuangan sampah, dan tidak adanya sistem proteksi kebakaran menyebabkan Desa Torokeku mengalami penurunan kualitas permukiman yang menyebabkan permukiman tersebut kumuh. (PermenPUPR. 2016)

Ditinjau dari kondisi tipologinya, Desa Torokeku berada di permukiman nelayan atau berada di kawasan pesisir/tepi laut, dengan luas wilayah 2.15 hektar dihuni oleh mayoritas suku bajo. Suku bajo sendiri adalah nelayan tradisional yang trampil dengan masalah kelautan dan hidupnya sepenuhnya tergantung pada laut, mereka sering disebut sebagai *sea nomad* atau “orang laut”. Laut bagi suku mutlak adanya, karena selain sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat mencari nafkah hidupnya. Rumah Suku Bajo sendiri memiliki ciri khas, dibangun di atas perairan, sederhana dan mampu beradaptasi di lingkungan yang ekstrem, seperti ombak, arus laut, dan angin, yang menjadi denyut kehidupan mereka sehari-hari. (Poedjowibowo. 2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang peningkatan kualitas terhadap

permukiman kumuh dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Pemugaran yaitu perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni. Peremajaan dilakukan untuk menciptakan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali / tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan / atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian Analisis Tingkat Kekumuhan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Pesisir di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tingkat kekumuhan permukiman pesisir di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
2. Menganalisis upaya peningkatan kualitas permukiman pesisir di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Permukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. dengan demikian kawasan kumuh mengindikasikan kawasan yang padat, tidak terawat, kotor tidak teratur, dan berkekurangan.

Kriteria Permukiman Kumuh

Berdasarkan PermenPUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh yaitu:

- 1) Ditinjau dari aspek bangunan gedung
 - a. Ketidakteraturan bangunan
 - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

- 2) Ditinjau dari jalan lingkungan Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:
 - a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.
 - b. Ketidak tersedianya permukaan jalan
- 3) Ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:
 - a. Ketidak tersediaan akses aman air minum. Kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar, kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter / orang / hari.
- 4) Ditinjau dari pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis.
- 5) Ditinjau dari pengelolaan persampahan
 - a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
 - b. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- 6) Ditinjau dari proteksi kebakaran
 - a. Kriteria kekumuhan ditinjau dari Proteksi kebakaran mencakup ketidak tersediaan:
 - b. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran.

Tipologi Permukiman Kumuh

Berdasarkan PermenPUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.

- 1) Permukiman kumuh di atas air,
- 2) Permukiman kumuh di tepi air,
- 3) Permukiman kumuh di perbukitan,
- 4) Permukiman kumuh di daerah rawan bencana,
- 5) Permukiman kumuh di dataran.

Penanganan Permukiman Kumuh

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh mencakup hal-hal:

- 1) Pemugaran yaitu perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni,
- 2) Peremajaan yaitu mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih

dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat,

- 3) Pemukiman Kembali yaitu pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (penyediaan rusunawa).

Wilayah Pesisir

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Permukiman pesisir adalah suatu lingkungan hunian yang terlatak di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat kegiatan penghidupan oleh kelompok pemukim tersebut yang tidak tercatat sebagai warga setempat, rawan kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit.

Batasan tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat garis batas nyata wilayah pesisir, garis batas tersebut hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi atau situasi setempat. Di tempat yang landai garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai dan sebaliknya untuk wilayah pantai yang terjal (Dahuri dkk, 2001). Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang batasan wilayah pesisir, kearah daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir yang terdapat di kawasan Permukiman Desa Torokek adalah ekosistem *mangrove*, lamun dan terumbu karang. Hutan *mangrove* merupakan hutan hujan yang terdapat di sepanjang garis pantai perairan tropis sampai sub-tropis dan mempunyai ciri-ciri tersendiri dengan kekhasan biota yang hidup disana. (Bengen, 2003).

Suku Bajo

Suku Bajo adalah nelayan tradisononal yang trampil dengan masalah kelautan dan hidupnya sepenuhnya tergantung pada laut, mereka sering disebut sebagai *sea nomad* atau “orang laut”. Persebaran Suku Bajo relative luas, di pesisir Indonesia, Malaysia, Brunei, Philipina, Vietnam, dan

Thailand. Suku Bajo yang menetap akan mencari sebuah labuhan yang berdekatan dengan sumber air tawar, terhindar dari tiupan angin kencang, kedalaman air yang dangkal, kawasan karang, hutan bakau sehingga terdapat banyak sumber hasil laut. (Poedjowibowo.2015)

Secara kultural, suku Bajo masih tergolong masyarakat sederhana dan hidup menurut tata kehidupan lingkungan laut, dikenal sebagai pengembara lautan (*sea nomads*), yaitu hidup dengan mata pencaharian yang erat hubungannya dengan lautan, serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan menangkap ikan di lautan. Laut dan suku Bajo merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kultur suku Bajo. Karena itu, ada dua konsep utama yang dikemukakan oleh Sulaeman Mamar yaitu: (1) Laut, adalah wilayah perairan yang luas dan airnya asin yang memiliki berbagai fungsi. Laut bagi suku Bajo mutlak adanya, karena selain sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat mencari nafkah hidupnya, (2) suku Bajo, adalah sekelompok orang pengembara lautan yang berdomisili bersama keluarganya di laut atau pesisir pantai. (Poedjowibowo.2015)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi kuantitatif. Yang bertujuan mengetahui tingkat kekumuhan di Desa Torokeku serta menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas yang menjadi obyek penelitian. (Bungin, 2008).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Torokeku Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2018 sampai dengan November 2018.

Populasi Penelitian

Populasi merupakan obyek ataupun subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya, seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2006) populasi adalah wilayah generalisasi, populasi dalam penelitian ini adalah rumah/hunian di Desa Torokeku.

Definisi operasional

Konsep operasional memuat beberapa definisi operasional mengenai variabel-variabel dan ukuran-ukuran yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data serta dalam menganalisis data. Konsep operasional yang ada di dalam penelitian, adalah:

- 1) Permukiman pesisir di Desa Torokeku adalah suatu lingkungan hunian yang terlatak di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan yang didalamnya terdapat kegiatan penghidupan oleh kelompok pemukim.
- 2) Kondisi bangunan hunian yaitu ketidakteraturan bangunan permukiman di Desa Torokeku yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi.
- 3) Kondisi jalan lingkungan yaitu jaringan jalan lingkungan permukiman di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea yang tidak tersambung ke seluruh lingkungan perumahan serta kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- 4) Kondisi penyediaan air minum yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu yang berada pada permukiman di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea.
- 5) Kondisi pengelolaan air limbah yaitu prasarana dan sarana serta sistem pengelolaan air limbah yang berada pada permukiman di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea tidak sesuai dengan standar teknis.
- 6) Kondisi pengelolaan persampahan yaitu prasarana dan sarana serta sistem pengelolaan persampahan yang berada pada permukiman di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 7) Kondisi proteksi kebakaran yaitu tidak adanya prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada permukiman di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea.
- 8) Lingkungan pesisir yaitu padang mangrove
- 9) Resiko bencana pesisir yaitu tinggi gelombang pasang surut air laut.
- 10) Peningkatan kualitas pemukiman kumuh di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea dilakukan dengan cara pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer diperoleh dari hasil survey lapangan yang dilakukan saat berada di permukiman wilayah pesisir Kecamatan Tinaggea dan melakukan wawancara langsung

dengan masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan.

- 2) Data Sekunder diperoleh dari instansi yang terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Konawe Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan, dan instansi lainnya. Di samping itu, data sekunder lainnya adalah buku literatur, internet, jurnal, tesis serta bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian dan berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan hanya sebagai data penunjang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi
Observasi dilakukan melalui cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah permukiman yang ada di Kecamatan Tinanggea yang berada di permukiman kumuh.
- 2) Wawancara
Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid tentang kondisi permukiman.
- 3) Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam potret objek terkait dan aktifitas di lokasi penelitian

Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai
1.	Kondisi Bangunan Hunian	Tingkat kepadatan bangunan	• Kepadatan bangunan lebih dari 100 unit/hektar	5
			• Kepadatan bangunan 80 -100 unit/hektar	3
			• Kepadatan bangunan 80 unit/hektar	1

		Jumlah Penghuni	• Jumlah penghuni lebih dari 5 KK • Jumlah penghuni lebih dari 3-5 KK • Jumlah penghuni 1-2 KK	5 3 1
		Rumah tidak layak huni	• 75% - 100 % rumah tidak layak huni • 50% - 74 % rumah tidak layak huni • 25% - 49 % rumah tidak layak huni	5 3 1
2.	Kondisi jalan lingkungan	Kondisi jalan lingkungan	• Tidak ada akses jalan/menggunakan perahu • Jalan Kayu • Jalan Beton	5 3 1
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	• Tidak ada kualitas • Berlubang • Rata	5 3 1
3.	Kondisi penyediaan air minum/air bersih	Sumber air bersih	• Sumber air bersih dari laut • Sumber air bersih dari air tanah/sungai • Sumber air bersih dari PDAM	5 3 1
		Ketersediaan air bersih	• 0% - 49% rumah terpenuhi • 50% -75% rumah terpenuhi • 75% - 100% rumah terpenuhi	5 3 1
4	Kondisi pengelolaan air limbah	Pengelolaan air limbah	• Tidak tersedianya pengolahan limbah • Kloset tidak terhubung dengan tangki septik • Kloset terhubung dengan tangki septik	5 3 1
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah	• Tidak Tersedianya • MCK umum • MCK Rumah Sendiri	5 3 1
		Prasarana dan sarana persampahan	• Tidak Tersedianya tempat sampah • Tersedianya tempat sampah umum • Tersedianya gerobak sampah atau kapal pengangkut sampah	5 3 1
5.	Kondisi pengelolaan persampahan	Prasarana dan sarana persampahan	• Tidak Tersedianya tempat sampah • Tersedianya tempat sampah umum • Tersedianya gerobak sampah atau kapal pengangkut sampah	5 3 1

		Jenis pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	• Tidak Terpelihara • Pemeliharaan berkala • Pemeliharaan rutin	5 3 1
6.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Sarana proteksi kebakaran	• Tidak ada alat proteksi kebakaran • Adanya Instalasi pemadam kebakaran dalam bentuk hidran • Adanya Instalasi hidran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	5 3 1
7.	Lingkungan Pesisir Mangrove	Kerusakan mangrove	• Luas Kerusakan mangrove $\geq 75\%$ • Luas Kerusakan mangrove $\geq 50 - <75\%$ • Luas Kerusakan mangrove $<50\%$	5 3 1
8.	Resiko bencana pesisir	Tinggi gelombang	• $> 2,6$ meter • $1,1-2,6$ meter • $< 1,1$ meter	5 3 1
		Pasang surut	• $> 4,0$ meter • $2,0 - 4,0$ meter • $< 2,0$ meter	5 3 1

Sumber: Dimodifikasi dari Permen PUPR No. 2 Tahun 2016

Teknik Analisis Data

Analisis Tingkat Kekumuhan

Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di wilayah pesisir ditentukan melalui cara pembobotan (*scoring*) sesuai hasil kuisioner dan observasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan Permen PUPR No.2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Dalam Permen PU tersebut, berdasarkan kekumuhan, suatu lokasi merupakan:

- Kumuh berat bila memiliki nilai 56 - 75.
- Kumuh sedang bila memiliki nilai 36 - 55.
- Kumuh ringan bila memiliki nilai 15 - 35.

Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Untuk mengetahui peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah pesisir Kecamatan Tinanggea menggunakan metode analisis deskriptif sebagai gambaran terstruktur dalam identifikasi kawasan permukiman. Dalam upaya peningkatan

kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan melalui pola-pola penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah serta mempertimbangkan tipologi permukiman kumuh. Pola-pola penanganan permukiman kumuh dilakukan meliputi (a) pemugaran, (b) peremajaan atau (c) pemukiman kembali dapat dilihat pada tabel 2,3 dan 4.

Tabel 2. Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Rehabilitasi. b. Rekonstruksi.
2	Jalan Lingkungan	Perbaikan Kontruksi jalan lingkungan.
3	Air Minum	a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana). b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana).
4	Air Limbah	a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana. b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana.
5	Sampah	a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah. b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah.
6	Pengamanan dan Kebakaran	a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana. b. Perbaikan hidran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana.
7	Lingkungan Pesisir	Penanggulangan
8	Resiko bencana pesisir	Proteksi atau Perlindungan

Tabel 3. Peningkatan Kualitas dengan Peremajaan

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. b. Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi. c. Penataan kawasan dengan

N o	Komponen	Jenis Kegiatan
		pengaturan petak bangunan. d. Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum). e. Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak.
2	Jalan Lingkungan	a. Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan. b. Peningkatan struktur jalan.
3	Air Minum	Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum.
4	Air Limbah	a. Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat. b. Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.
5	Sampah	a. Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP). b. Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP.
6	Pengamanan dan Kebakaran	a. Pembangunan sarana proteksi kebakaran. b. Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran.
7	Lingkungan Pesisir	Pemulihan kerusakan atau Rehabilitasi
8	Resiko bencana pesisir	Akomodasi

Tabel 4. Peningkatan Kualitas dengan Pemukiman Kembali

N o	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Pembangunan permukiman di lokasi baru. b. Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model baru (Rumah Susun).
2	Jalan Lingkungan	Pembangunan jalan baru.
3	Air Minum	Pembangunan SPAM unit baru.
4	Air Limbah	Pembangunan unit pengolahan air limbah baru.
5	Sampah	Pembangunan PSP baru.
6	Pengamanan dan Kebakaran	a. Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana. b. Pembangunan hydran air.
7	Lingkungan Pesisir	Pemulihan kerusakan
8	Resiko Bencana Pesisir	Retreat atau Relokasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Sejarah Desa

Desa Torokeku terbentuk pada tanggal 31 Mei 1999 yang mayoritas di huni oleh suku Bajo dan

sebagian kecil dihuni oleh suku Bugis, Muna, Tolaki dan Buton. Torokeku berasal dari bahasa Bajo. Kata Toroh dalam bahasa Bajo yang berarti “Ujung” dan Keku berarti “Kali (sungai).

Kondisi Demografi

Desa Torokeku terletak sekitar 7 Km ke arah Timur ibukota kecamatan Tinanggea yang mempunyai luas wilayah 2,15 ha. Desa Torokeku merupakan daerah pesisir dan pantai yang pada umumnya rumah hunian berada di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Torokeku memiliki batas - batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lapulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Tiworo Kab. Muna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matambawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungin Permai



Gambar 1. Lokasi Desa Torokeku

Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Desa Torokeku merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Kecamatan Tinanggea yang terdiri dari 4 (empat) dusun. Pada tahun 2018, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk di Desa Torokeku berjumlah 1.101 jiwa. Jumlah penduduk di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea dapat dilihat pada Tabel .1.

Tabel.1. Jumlah Penduduk di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea, Tahun 2018

No	Desa Torokeku	Jumlah Penduduk		Total (jiwa)
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1	Dusun I	174	179	353
2	Dusun II	122	117	239
3	Dusun III	150	142	291
4	Dusun IV	103	115	218
	Jumlah	548	550	1101

Sumber : Hasil Survei, 2018

2. Jumlah Kepala Keluarga

Pada tahun 2018, jumlah kepala keluarga di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea mencapai 275 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga Desa Torokeku di Kecamatan Tinanggea tahun 2018

No	Desa Torokeku	Jumlah Kepala Keluarga (jiwa)
1	Dusun I	87
2	Dusun II	67
3	Dusun III	66
4	Dusun IV	65
	Jumlah	275

Sumber : Hasil Survei, 2018

3. Jumlah rumah/bangunan

Pada tahun 2018, jumlah rumah/bangunan di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea mencapai 232 unit. Jumlah rumah/bangunan di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Rumah/Bangunan di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea tahun 2017

No	Desa Torokeku	Jumlah rumah/bangunan (unit)
1	Dusun I	74
2	Dusun II	50
3	Dusun III	58
4	Dusun IV	50
	Jumlah	232

Sumber : Hasil Survei, 2018

Status Kepemilikan Bangunan dan Tanah

Desa Torokeku tidak memiliki status kepemilikan lahan atau tidak bersertifikat dan hanya membayar pajak bumi dan bangunan sebagai pegangan mereka. Ini berarti bahwa tanah yang ditempati masyarakat di wilayah pesisir Desa Torokeku adalah Hak Pakai (HP). Selain itu masyarakat memperoleh lahan dengan cara ganti rugi dari pemilik yang terdahulu dan sebagian besar berupa harta warisan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 18b dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

Tingkat Kekumuhan di Wilayah Pesisir Desa Torokeku

Mengacu pada Permen PUPR No.2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyatakan bahwa kriteria permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh. Hasil pembobotan tingkat kekumuhan di kawasan permukiman wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Kekumuhan di Wilayah Pesisir Desa Torokeku

No	Kriteria Kekumuhan	Jumlah Bobot	Tingkat Kekumuhan
1.	Kondisi bangunan rumah/hunian	9	Kumuh Sedang
2.	Kondisi jalan lingkungan	4	
3.	Kondisi penyediaan air minum/air bersih	8	
4.	Kondisi pengelolaan air limbah	10	
5.	Kondisi pengelolaan persampahan	10	
6.	Kondisi proteksi kebakaran	5	
7.	Kondisi kerusakan lingkungan pesisir mangrov	5	
8.	Resiko bencana pesisir	2	
	Jumlah	53	

Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman di Wilayah Pesisir

Kawasan permukiman masyarakat Desa Torokeku dengan tipologi sebagai permukiman kumuh di atas air menjadikan kawasan permukiman ini lebih khusus dalam penanganannya karena karakter dari pola bermukim mereka yang dari dulunya sudah tinggal di atas air, dan kebiasaan

masyarakat yang tinggal berdekatan-dekatan sebagai cara memperkuat hubungan sosial mereka.

Upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah pesisir Desa Torokeku dengan cara Pemugaran dan Peremajaan yakni dilakukan melalui rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan rumah di lokasi baru; perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana umum seperti jalan lingkungan, air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan sarana proteksi kebakaran; serta melalui pemulihan kerusakan ekosistem mangrove.

Melibatkan semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam seluruh proses pengelolaan mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan permukiman kumuh.

Pada kawasan kumuh di permukiman wilayah pesisir Desa Torokeku difokuskan untuk dibangun permukiman baru menjadi permukiman yang layak huni dengan ukuran rumah 5 m x 10 m dengan luas kavling tanah 10 m x 15 m. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Permukiman Baru

Upaya peningkatan kualitas permukiman di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea yakni:

- 1) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek bangunan rumah
 - Pemugaran dan Peremajaan dengan cara merehabilitasi 129 rumah tidak layak huni dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis, misalnya untuk tiang pancang menggunakan struktur benton bertulang.
 - Peremajaan dengan cara membangun rumah baru sebanyak 43 unit untuk memenuhi rasio 1 rumah 1 KK.

- Peremajaan dengan cara Penataan kawasan kavling rumah type 50/150m2 sebanyak 144 unit
- 2) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek jalan lingkungan
 - a. Pemugaran dengan cara memperbaiki konstruksi jalan lingkungan yang sudah ada.
 - b. Peremajaan dengan cara rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar jalan menjadi 2 meter untuk jalan lingkungan dengan konstruksi beton.
 - c. Peremajaan dengan cara pembangunan jalan baru sepanjang 1.941 meter dengan lebar jalan 2 meter.
 - 3) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek pengelolaan air minum/air bersih
 - Pemugaran dengan cara meningkatkan pelayanan air bersih dengan menambah 2 mesin pompa air dan menambah jumlah titik pengeboran.
 - Pemugaran dengan cara perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, dan korosi).
 - Peremajaan dengan cara rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, dan penambahan instalasi pengelolaan air minum dan pembangunan tower air
 - 4) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek pengelolaan air limbah
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan/ pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman pesisir,
 - b. Pembangunan pengolahan air limbah individual T-Pikon-H di tiap rumah.
 - c. Pengelolaan lingkungan bersih dan sehat melalui penyediaan sarana air limbah rumah,
 - 5) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek pengelolaan persampahan dengan cara melakukan peremajaan yaitu:
 - Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat,
 - Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) sebanyak 1 unit
 - Pengadaan gerobak sampah dan kapal pengangkut sampah,
 - 6) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek proteksi kebakaran dengan cara peremajaan yaitu:
 - Pembangunan sarana proteksi kebakaran,
 - Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana,
 - Pembangunan hydran air

- 7) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek lingkungan pesisir peremajaan yaitu:
 - Penanaman mangrove di wilayah pesisir Desa Torokeku,
 - Pemeliharaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir mangrove,
 - Pembangunan dan konservasi lingkungan (sustainable development),
 - Memonitoring setiap pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Desa Torokeku.
- 8) Peningkatan kualitas ditinjau dari aspek resiko bencana pesisir dengan cara peremajaan yaitu:
 - a. Pembangunan proteksi atau perlindungan terhadap bencana permukiman di wilayah pesisir Desa Torokeku,
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan cara peremajaan yaitu:
 - Pembangunan Area Parkir Kendaraan dan Tempat Pelelangan Ikan
 - Pembangunan Masjid, Sarana Olahraga, Balai desa, Posiandu dan Sekolah
 - Pembangunan Fasilitas Rekreasi Rumah Singgah, *Tracking Magraov* dan Ruang Terbuka Hijau dengan luas 250m² di kompleks perumahan.
- g. Kerusakan hutan mangrov yang mencapai 68%
- h. Tinggi pasang surut air laut mencapai 2 meter sedangkan tinggi gelombang mencapai 1,1 meter.
2. Upaya peningkatan kualitas dilakukan dengan penanganan pemugaran dan peremajaan yaitu:
 - 1) Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tidak layak huni sebanyak 129 unit serta penataan kavling bangunan type 50/150m².
 - 2) Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar menjadi 2 meter, perubahan material kayu menjadi beton, pembangunan jalan baru 1.941 meter,
 - 3) Penambahan mesin pompa, penambahan titik pengeboran dan peningkatan jaringan perpipaan.
 - 4) Membangun sistem pengolahan air limbah individual T-Pikon-H di setiap rumah.
 - 5) Membangun sarana dan prasarana persampahan umum seperti TPS dan pengadaan gerobak / kapal pengangkut sampah.
 - 6) Membangun sarana proteksi kebakaran seperti tower air dan instalasi hidran di setiap dusun.
 - 7) Penanaman kembali ekosistem mangrov sebagai sarana pelengkap ruang terbuka hijau.
 - 8) Membangun sarana dan prasarana umum lainnya seperti, sarana pemerintahan, perdagangan, taman bermain, lapangan bola, Masjid, Ruang Terbuka Hijau, Kantor Desa, Posiandu, TK, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan area parkir.
 - 9) Merencanakan Peta Pengembangan Desa sesuai hasil musrembang Desa Torokeku Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kekumuhan permukiman pesisir di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan masuk dalam kategori kumuh sedang. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Kepadatan bangunan mencapai 107,9 unit/ha, dimana ada 129 rumah yang tidak layak huni
 - b. Ada 272 meter jalan yang belum menghubungkan beberapa rumah, dan 105 meter jalan dengan kondisi rusak serta mayoritas konstruksi jalan menggunakan kayu.
 - c. Ketersediaan air bersih di Desa Torokeku hanya mampu memenuhi 20,40 ltr/org/harinya, sedangkan standar konsumsi air bersih per orang per hari adalah 60 liter.
 - d. Dari 232 unit rumah, hanya dua rumah yang menggunakan sistem pengolahan limbah yang menghubungkan ke tangki septictank sedangkan selebihnya langsung membuang ke tanah dan laut.
 - e. Tidak adanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - f. Tidak adanya sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan rencana tata bangunan dan lingkungan permukiman di kawasan pesisir sehingga dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam merencanakan pembangunan sarana dan prasarana dasar serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayah pesisir agar tidak menjadi kumuh.

2. Pemerintah Daerah harus merangkul masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman wilayah pesisir serta perlu adanya upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan oleh aparat dan dinas terkait tentang lingkungan yang sehat agar tidak terdapatnya kumuh di daerah tersebut.
3. Bagi masyarakat di kawasan pesisir agar menjaga keselestarian ekosistem pesisir dan harus memperhatikan arahan pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Bala Ram. 2010. *"Urban Poverty: A Sociological Study of Shankhanmul Squater"*. Dhauragiri Journal of Sociology and Anthropology Vol. 4, 2010.
- Amir, Mahmud. 2007. *Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (studi kasus desa morodemak dan purwosari kabupaten demak)*. UNDIP. Semarang
- Bengen, D G. 2004. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Cetakan Ketiga. Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor
- BMKG Kendari. 2017. *Stasiun Meteorologi Maritim Kendari*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kendari
- BPS Kabupaten Konawe Selatan. 2017. *Kecamatan Tinanggea dalam Angka, 2017*. BPS Kabupaten Konawe Selatan. Konawe Selatan.
- Burhan, Bungin. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dahuri, Rokhmin, Dkk. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. edisi ke-3 Penerbit PT. Paradnya Paramita, Jakarta.
- Dirjen Cipta Karya. 2016. *Program KOTAKU*. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum RI. Jakarta.
- Drakakis-Smith D. 1980. *Urbanisation, Housing and the Development Process*. Croom Helm. London.
- Fitria, N dan Pratiwi R.S. 2014. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat. *Jurnal Teknik POMITS*. Vol. 3 No. 2 p.1-2.
- Hastuti, Y dan Akhmad S. 2017. Karakteristik Spasial Permukiman Kumuh Kota Madya Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Dinamika* Vol. 08. No.2.
- Mingki, M. 2015. Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol.7 No.2 p. 2.
- Morris, Desmond. 1977. *Manwalking: Field Guide to Human Behavior*. Harry N. Abrams, Inc. Publishers. New York.
- Nurcahyanti, E.E. 2010. Penataan Permukiman Nelayan Puger Ditinjau Dari Aspek Kekumuhan. *Jurnal Tata Kota dan Daerah* Vol. 2 No. 2. p.1-2
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 *Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove*
- Keputusan Bupati Nomor 648/440 tahun 2014 tentang *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Konawe Selatan*.
- Kurniasih S. 2007. Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara Jakarta Selatan. *Jurnal Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan*.
- Khomarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Yayasan Real Estate Indonesia. PT.Rakasindo. Jakarta.
- La Sara. 2014. *Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Gagasan Memelihara Aset Wiayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa. CV. Alfabet: Bandung.
- Poedjowibowo, Djajeng. 2016. *Permukiman Suku Bajo Di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Prayitno, Budi. 2016. *Skema Inovatif Penanganan Pemukiman Kumuh*. Penerbit Gaja Mada University Press. Yogyakarta.

- Poedjowibowo, Djajeng.2015. *Permukiman Suku Bajo Di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Noor, Rijal. 2011. *T-Pikon-H Sebagai Teknologi Alternatif Untuk Perbaikan Sanitasi di Daerah Spesifik Rawa..*
- SNI 03-1733-1989, *tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota*.
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta
- Syarief Z. 2000. *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*. USU Press. Medan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*